



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Januari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
UNIT KERJA : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
SUB UNIT KERJA : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : PETRUS RINDA
2. Jabatan : KEPALA PELAKSANA
3. NHK : 70917

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp.

766.722.000

1. Tanah Seluas 937 m2 di KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 59.968.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 800 m2/104 m2 di KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 207.200.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 612 m2/48 m2 di KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 150.960.000
4. Tanah Seluas 10000 m2 di KOTAWARINGIN BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 71.500.000
5. Tanah Seluas 10000 m2 di KOTAWARINGIN BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 71.500.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 598 m2/120 m2 di KOTAWARINGIN BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 205.594.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp.

68.000.000

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG MINI BUS Tahun 2001, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
2. MOTOR, HONDA KARISMA SEPEDA MOTOR Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
3. MOTOR, HONDA SUPRA FIT SEPEDA MOTOR Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
4. MOBIL, DAIHATSU ZEBRA PICK UP Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 12.500.000



C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	20.630.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	109.425.925
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	964.777.925
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	964.777.925

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **31 Januari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.